

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Financial inclusion merupakan topik penting serta kerap digunakan sebagai perhatian kebijakan bagi pemerintah dan bank sentral di berbagai negara. Inklusi Keuangan merupakan sebuah movement dalam perluasan akses keuangan sehingga dapat dijangkau dan dinikmati oleh semua kalangan dan nantinya akan memperkuat pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan kualitas serta untuk mengatasi kemiskinan. Negara dengan Inklusi Keuangan yang baik cenderung akan terbebas dari hambatan dalam mengakses layanan keuangan, termasuk dengan melibatkan infrastruktur dan teknologi di dalamnya (Santoso & Meera, 2017).

Menurut ABDI (2014), pertumbuhan inklusif adalah tujuan yang sangat krusial dalam penyusunan kebijakan ekonomi dunia, terutama di negara-negara Asia. Seluruh pemangku kebijakan sudah memberi perhatian terhadap inklusi keuangan, khususnya pada bidang ekonomi dan sosial dalam berbagai akses ke kesehatan, pendidikan, jamsos, sanitasi, listrik, dan transportasi, serta jasa finansial bagi seluruh lapisan penduduk.

Di Asia, program inklusi keuangan telah dilaksanakan dengan sangat intensif, menjangkau sebanyak mungkin orang yang belum menikmati layanan jasa keuangan formal karena sampai saat ini terdapat hambatan akses. Hambatan dan kendala tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara kerja lembaga keuangan dan ketidak sesuaian anatara produk yang ditawarkan & kebutuhan masyarakat berpenghasilan kecil (Dienillah & Anggraeni, 2016).

Saat ini, Indonesia juga turut membangun strategi nasionalnya dalam rangka menyongsong tingkat *economic growth* melalui pemerataan penghasilan, pemberantasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan inklusi keuangan. Untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perlu adanya pendalaman di bidang finansial, baik dari sisi perbankan maupun non perbankan, sehingga semua dapat memiliki akses akan layanan keuangan dengan kualitas tinggi dan biayanya yang terjangkau. Dalam

meningkatkan performa pada sektor keuangan, Indonesia melakukan beberapa strategi dalam mewujudkannya, antara lain, 1) perluasan inovasi produk keuangan, 2) alternatif pembayaran, dan 3) pengembangan infrastruktur jasa keuangan (Sanjaya & Nursechafia, 2016).

Perpres RI Nomor 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah menjadi landasan hukum serta pedoman dalam melaksanakan program keuangan inklusif di Indonesia. SNKI ini merupakan cara untuk mencapai tujuan keuangan inklusif, memacu perkembangan ekonomi, mempercepat pemberantasan tingkat kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Dengan adanya SNKI, maka hak individu masyarakat Indonesia dalam mengakses produk dan jasa keuangan yang berkualitas dan terjangkau akan terjamin. Dengan upaya tersebut, maka SNKI akan mulai menargetkan kebijakannya pada masyarakat dengan kelas ekonomi ke bawah (Bank Indonesia, 2014).

Namun, harapan dengan keadaan yang sesungguhnya masih sedikit bertolak belakang. Belum semua masyarakat Indonesia masuk ke dalam golongan “*Banked*” dan “*Well Literate*”, dimana penduduk Indonesia belum memiliki pemahaman yang kuat tentang cara terbaik menggunakan uang untuk hal produktif.

Gambar 1. 1 SEA Adult Population

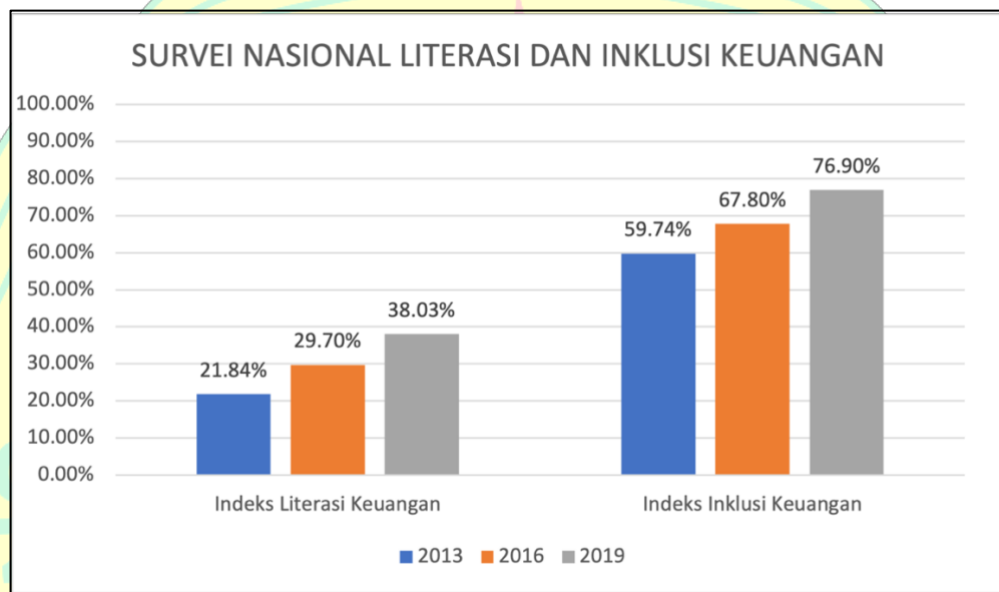


Sumber: TEMASEK

Menurut data yang diperoleh dari TEMASEK (2019), Indonesia dengan total orang dewasa sebanyak 181 juta jiwa, hanya sebanyak 42 juta jiwa yang sepenuhnya tergolong *banked* atau mempunyai akses penuh dalam jasa keuangan.

47 juta jiwa lainnya masih tergolong *underbanked*, yaitu memiliki rekening bank namun tidak dengan akses kredit, investasi, dan asuransi. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 92 juta jiwa masih tergolong *unbanked* yaitu tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki akses jasa keuangan lainnya.

Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Indonesia



Sumber: Diolah oleh penulis

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan Survei Nasional pada tahun 2019. Hasil survei ketiga tersebut menjelaskan bahwasanya *financial literacy index* penduduk Indonesia mencapai 38,03 % dan *financial inclusion index* sebesar 76,19%. Dapat terlihat bahwasanya dalam jangka 3 tahun, pemahaman dan akses keuangan masyarakat mengalami peningkatan yakni sebesar 8,33% dan 8,39% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Kendati demikian, angka tersebut masih terlihat rendah apabila melihat indeks dari negara tetangga, seperti Singapore, Thailand, dan juga Malaysia. Di tahun 2019, *financial literacy index* Singapura telah mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 98%. Diikuti oleh Thailand sebesar 82%, dan juga Malaysia 82%. Kurangnya akses terhadap keuangan formal menyebabkan tingkat inklusi keuangan Indonesia menempati urutan kedua terendah di antara negara ASEAN.

Menurut Bank Indonesia, ada berbagai penyebab dari tingginya tingkat “unbanked” di Indonesia. Bisa terlihat melalui sisi *supply*, yakni penyedia jasa dan juga sisi *demand* (masyarakat). Hal tersebut disebabkan dikarenakan masih adanya *channel barrier* (sarana yang tidak sesuai), *price barrier* (mahal), dan *design product barrier* (produk yang tidak cocok). (Bank Indonesia, 2021).

Begitupun menurut Santoso & Meera (2017) yang menyatakan bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong unbankable dan mengalami kesulitan pada saat ingin mengakses dan mendapatkan layanan keuangan formal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya “lack”, yakni ketidakmampuan mereka dalam memenuhi standar, mekanisme, dan prosedur dari produk atau layanan keuangan yang ada. Selain itu, kurangnya literasi keuangan di antara segmen yang lebih miskin juga merupakan hambatan yang signifikan terhadap akses dan penggunaan yang tepat dari layanan keuangan formal.

Indonesia dengan wilayah luas, terdiri dari beribu-ribu pulau serta provinsi yang banyak mengakibatkan adanya permasalahan dalam pengadaan infrastruktur layanan keuangan. Lembaga keuangan sangat membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membangun cabang fisik yang dapat dijangkau dan melayani semua pelanggan.

Dalam memperbaiki “lack” dan “barrier” dari akses produk dan layanan keuangan, perlu adanya penyesuaian. Produk dan layanan keuangannya harus dikemas sedemikian rupa agar bisa dijangkau oleh semua kalangan (khususnya masyarakat miskin). Inovasi dan kreasi dalam inklusi keuangan sangat dibutuhkan. Perlu adanya strategi diferensiasi, segmentasi, dan fitur desain penting untuk memiliki produk keuangan yang lebih baik.

Beberapa ahli mengusulkan dengan menggunakan TIK dan sistem pembayaran yang didukung oleh smartphone. Perkembangan TIK mendatangkan berbagai peluang bagi kita untuk menyediakan layanan keuangan khusus bagi semua kalangan, khususnya masyarakat yang masih tergolong miskin dan mempunyai keterbatasan dalam mengakses produk dan layanan keuangan.

Pemanfaatan teknologi dalam keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem perekonomian yang efektif dan efisien. Ditambah lagi saat ini, smartphone

sudah merupakan hal yang lumrah dan dimiliki oleh hampir semua kalangan. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi yang ada diharapkan akan mempercepat dalam mengurangi angka “unbanked” di Indonesia.

Sesuai dengan hasil temuan dari Bank Sentral Eropa yang menunjukkan cara yang ampuh untuk mengembangkan sektor keuangan adalah dengan memperbaiki sistem pembayaran yaitu dengan melakukan migrasi ke sistem pembayaran yang lebih efisien, dapat merangsang perekonomian, konsumsi dan perdagangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penciptaan digital payment dan penerapan cashless payment sangat diperlukan sebagai bentuk inovasi lebih lanjut dalam sistem keuangan yang lebih efisien (Hasan et al., 2013).

Menciptakan Layanan Keuangan Digital dengan cashless payment usage yang ramah bagi semua kalangan sangat berpotensi untuk memecahkan banyak tantangan dalam menghadapi masyarakat golongan “unbanked”. Diaktifkan oleh teknologi dan berdasarkan data yang kuat, digital payment dapat membantu meningkatkan akses, meningkatkan kenyamanan, memangkas biaya, dan memberikan Layanan Keuangan yang lebih inklusif untuk semua orang (TEMASEK et al., 2019).

Selanjutnya, mengarahkan pembangunan keuangan dengan melakukan intervensi dalam teknologi diyakini merupakan hal yang tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusdianasari (2018). bahwasanya Intervensi teknologi dalam pengembangan keuangan diyakini dapat meningkatkan akses dan layanan ke sektor perbankan serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang belum dapat menjangkau sektor keuangan formal secara optimal

Menurut GSMA (dalam Son et al., 2020), dalam dekade terakhir, digital money telah membantu memperluas layanan keuangan lebih dari apa yang dilakukan bank formal. Laporan GSMA juga menemukan bahwasanya setidaknya 19 negara memiliki lebih banyak rekening mobile money daripada rekening bank dan 37 negara memiliki 10 kali lebih banyak mobile money agent daripada cabang bank formal.

Lebih lanjut lagi, Zandi (dalam Tee & Ong, 2016) menyatakan bahwasanya Digitalisasi dalam hal pembayaran telah mendorong pertumbuhan ekonomi 56

negara di dunia. Digital & Cashless Payment Usage ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan konsumsi perekonomian. Selain itu, adopsi transaksi elektronik sangat penting untuk transparansi, akuntabilitas dan pengurangan penipuan terkait uang tunai, elemen fundamental dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2013 hingga 2019, *cashless payment usage* selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya alat pembayaran non tunai telah diterima oleh masyarakat sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, penggunaan cashless payment perlu digalakkan dan ditingkatkan di Indonesia dalam rangka mewujudkan cashless society, karena dengan hadirnya alat pembayaran cashless dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong konsumsi perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aminata & Sjarif, 2020).

Layanan pembayaran digital di Indonesia dipercaya dapat memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi hanya melalui suatu media yaitu aplikasi *e-wallet*. Aplikasi “dompet” ini memiliki potensi yang sangat gemilang, diperkirakan akan semakin cerah dengan adanya bonus demografi Indonesia tahun 2030, dengan 74,6% pengguna berusia antara 20 hingga 35 tahun (Mahani, 2019).

Dari banyaknya provinsi di Indonesia, DKI Jakarta yang merupakan pusat bisnis dan pusat administrasi dengan infrastruktur TIK yang lebih baik dari kota-kota lain, diyakini berperan sebagai penyumbang cashless payment usage terbanyak di Indonesia karena DKI Jakarta termasuk ke dalam kategori kota dengan tingkat penggunaan perangkat TIK unit individu yang sangat tinggi, yaitu mencapai sebesar 96,01%. Selain itu, tingkat penggunaan internet di DKI Jakarta juga sangat tinggi, yaitu 82,63% untuk individu dan 34,49% untuk rumah tangga. *Smartphone* menjadi sarana utama dalam mengakses internet, dengan 98,55% pengguna (Kemkominfo, 2019).

Dugaan tersebut juga diperkuat oleh data survei OJK pada tahun 2019 bahwasanya DKI Jakarta termasuk provinsi dengan tingkat inklusi keuangan tinggi dan literasi keuangan tinggi. Indeks literasi keuangan DKI Jakarta sudah mencapai 59,16% dan indeks inklusi keuangan 94,76%.

Kendati demikian, keadaan tersebut memperlihatkan adanya kejomplangan antara kedua indeks tersebut. Dapat dikatakan bahwasanya masih sangat banyak individu yang mampu dan tahu cara memakai layanan dari suatu jasa keuangan tetapi belum ter-*acknowledge* atau belum mendapat pemahaman yang baik terhadap layanan jasa keuangan tersebut.

Didukung oleh (Kirana & Havidz (2020) yang menyatakan bahwasanya meskipun DKI Jakarta masuk dalam kategori kota dengan inklusi tinggi dan literasi tinggi, masih banyak keterbatasan yang ditemukan. Misalnya, masyarakat hanya menggunakan metode dan alat pembayaran non tunai tanpa mengetahui besar dampak dan kontribusi yang dapat mereka berikan kepada bangsa.

Perlu digaris bawahi disini bahwasanya penyebaran cepat teknologi pembayaran mobile dan layanan keuangan alternatif yang dikombinasikan dengan kurangnya literasi keuangan dapat memperburuk ketidaksetaraan kekayaan. (Lusardi, 2019).

Hal terpenting untuk mengedukasi masyarakat dalam hal keuangan adalah dengan memberikan literasi keuangan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah keuangan. Dengan demikian, mereka dapat menerapkan pengetahuannya untuk mengevaluasi dan menganalisis produk & jasa keuangan, sehingga nantinya bisa memberikan keputusan keuangan yang tepat. (Kirana & Havidz, 2020). Karena pada dasarnya, Literasi keuangan mendorong permintaan layanan keuangan untuk membangun kesadaran permintaan masyarakat, sementara inklusi keuangan mendorong dari sisi penawaran dengan menyediakan permintaan masyarakat di pasar keuangan.

DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, seharusnya bisa menjadi tolak ukur bagi kota atau provinsi yang lain. Penulis percaya masih ada celah untuk meneliti terkait hal-hal yang membuat adanya keterbatasan DKI Jakarta dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan dan indeks literasi keuangan.

Berangkat dari penjelasan diatas, peneliti memiliki keinginan untuk mencari dan menggali informasi lebih mengenai “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Cashless Payment Usage* terhadap Inklusi Keuangan di DKI Jakarta (Studi pada Pengguna *E-Wallet*)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Financial Literacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Inclusion* di DKI Jakarta?
2. Apakah *Cashless Payment Usage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Inclusion* di DKI Jakarta?
3. Apakah *Financial Literacy* mempunyai hubungan dengan *Cashless Payment Usage* di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Financial Inclusion* di DKI Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh *Cashless Payment Usage* terhadap *Financial Inclusion* di DKI Jakarta
3. Menganalisis pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Cashless Payment Usage* di DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam akademis, peneliti berharap penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat luas terkait inklusi keuangan, literasi keuangan, dan manfaat dari adanya digital payment bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam hal praktis, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah, stakeholder, dan lembaga penting lainnya dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait peningkatan inklusi keuangan & literasi keuangan di DKI Jakarta dengan mempertimbangkan peningkatan penggunaan *cashless payment*.